

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik identitas telah menjadi salah satu fenomena yang menonjol dalam kehidupan sosial dan politik global.¹ Di berbagai negara, termasuk Indonesia, politik identitas seringkali muncul sebagai alat yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk memperjuangkan kepentingan mereka, baik dalam hal sosial, budaya, maupun politik. Fenomena ini tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan manusia dalam mencari pengakuan atas identitasnya.² Dalam politik, identitas menjadi instrumen yang dapat memperkuat solidaritas internal suatu kelompok, tetapi juga berpotensi menciptakan polarisasi di tengah masyarakat.

Secara ontologi, politik identitas merujuk pada keberadaan dan hakikat identitas dalam ruang politik. Identitas dalam politik dapat berbentuk etnis, agama, budaya, bahasa, dan bahkan gender, yang

¹Apriando, A., Ridho Akustyo, B., Miardi, M., dan Agustina, S. M., “Politik Identitas, Ancaman Demokrasi dan Ketahanan Nasional Jelang Pilpres 2024,” *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, VI, 1, (2024), p. 2.

² Kholilurohman, K., “Praktik Politik Identitas Menuju Pemilu 2024 Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi,” *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, IV, 1, (2024), pp. 60–80.

digunakan untuk membangun kekuatan politik dan solidaritas kelompok tertentu.³ Identitas-identitas ini menjadi dasar yang menentukan posisi suatu kelompok dalam arena politik yang sering kali kompetitif dan berorientasi pada pengaruh kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, politik identitas tidak hanya merupakan fenomena kontemporer, tetapi juga berakar pada sejarah panjang pembentukan bangsa yang beragam secara budaya dan agama.

Epistemologi politik identitas berfokus pada bagaimana pemahaman tentang identitas terbentuk dan dikelola oleh aktor-aktor politik. Pemahaman ini biasanya diperoleh melalui narasi-narasi yang dibangun oleh media, pendidikan, pengalaman historis, dan interaksi sosial sehari-hari. Di era reformasi terbaru, media sosial menjadi platform utama dalam penyebaran informasi dan pembentukan kesadaran politik berbasis identitas.⁴ Berbagai kelompok masyarakat, mulai dari individu hingga organisasi politik, menggunakan narasi identitas untuk memperkuat dukungan politik mereka. Namun, di sisi lain, penyebaran informasi berbasis identitas juga berpotensi memicu polarisasi dan konflik sosial.

³ Sulaeman, E., *Politik Identitas: Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), p. 16.

⁴ Maulany, N. N., dan Jelantik, S. K., "Komunikasi Politik dalam Konteks Sejarah," *Samvada: Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relation*, II, 2, (2023), p. 4.

Aksiologi politik identitas berkaitan dengan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kelompok melalui penggunaan identitas dalam politik. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, pengakuan hak-hak kelompok minoritas, representasi yang lebih inklusif, dan kebebasan berekspresi menjadi tujuan utama dari banyak gerakan politik identitas. Namun, aksiologi ini juga memiliki sisi negatif ketika identitas digunakan sebagai alat politik untuk memanipulasi opini publik, menciptakan segregasi sosial, atau menyebarkan kebencian terhadap kelompok lain.⁵ Oleh karena itu, politik identitas di era reformasi terbaru perlu dipahami dengan bijak agar nilai-nilai yang dikedepankan tidak justru merusak tatanan sosial.

Era reformasi yang dimulai pada 1998 membuka ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi yang lebih luas di Indonesia. Namun, kondisi ini juga membawa tantangan baru dalam bentuk meningkatnya politik identitas yang semakin menonjol. Beberapa aspek penting yang dapat dikaitkan dengan politik identitas di era reformasi terbaru meliputi penggunaan media sosial, polarisasi politik, serta perjuangan keadilan dan representasi bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Media sosial telah menjadi alat yang

⁵ Tutukansa, A. F., "Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas di Indonesia," *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, XIV, 1, (2022), p. 65.

sangat efektif dalam membangun narasi identitas dan memperluas pengaruh politik suatu kelompok. Sentimen identitas sering kali digunakan untuk memperkuat dukungan politik atau menyebarkan disinformasi yang dapat memperburuk polarisasi di masyarakat.

Buya Hamka memiliki pandangan yang berbeda mengenai politik identitas. Ia memperbolehkan politik identitas, namun dengan syarat-syarat tertentu. Hamka berpendapat bahwa identitas, terutama identitas Islam, harus ditekankan dalam politik untuk mewujudkan politik identitas yang jelas. Sikap politik seorang Muslim, menurut Hamka, haruslah jelas, yaitu berpihak pada Islam.⁶ Namun, jika tidak ada pihak yang secara eksplisit mewakili Islam, umat Islam harus mencari pihak yang paling dekat dengan nilai-nilai Islam. Syarat utama yang ditekankan Hamka adalah bahwa Islam harus tetap berdiri sendiri karena memiliki tujuan yang berbeda dengan agama-agama lain. Dalam hal pemilihan pemimpin, Hamka lebih mendukung pemilihan wakil atau pemimpin dari kalangan Muslim, terutama jika pilihan yang ada tidak mencerminkan prinsip-prinsip Islam. Dengan kata lain, meskipun politik identitas diperbolehkan,

⁶ Akhdan, G., dan Bakar, A., "Buya Hamka dan Narasi Politik Identitas dalam Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Ilmu Politik dan Cita-cita*, I, 1, (2023), p. 99

prinsip Islam harus menjadi dasar utama dalam pemilihan pemimpin atau wakil politik.⁷

Di sisi lain, M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah mengemukakan pandangan yang lebih moderat dan inklusif mengenai politik identitas. Beliau menekankan bahwa dalam memilih pemimpin, yang lebih penting adalah kompetensi, integritas, dan keadilan, bukan identitas agama, jenis kelamin, atau etnis⁸. Ia secara tegas menolak diskriminasi, intoleransi, dan eksklusivitas dalam politik, dan mendorong umat Islam untuk bersikap terbuka dan toleran terhadap keragaman. M. Quraish Shihab juga mengangkat isu-isu terkait politik identitas, seperti pemilihan pemimpin non-Muslim, perempuan, dan golongan minoritas. Pemikirannya berfokus pada mendorong kesetaraan, keadilan, dan partisipasi, yang diyakini akan memberi dampak positif terhadap kondisi politik.⁹

Fenomena politik identitas di Indonesia mencuat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam pemilihan pemimpin, seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Salah satu

⁷ Akhdan dan Bakar, "Buya Hamka dan Narasi Politik Identitas...", p. 99.

⁸ Mismubarak, M., "Politik Identitas dalam Tafsir Al-Mishbah (Tela'ah Konseptual Pemikiran M. Quraish Shihab dan Implikasinya pada Dinamika Politik di Indonesia)," Disertasi Doktorat, Institut PTIQ Jakarta, (2024), p. 4.

⁹ Mismubarak, "Politik Identitas dalam Tafsir Al-Mishbah...", p. 4.

calon, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menjadi sorotan usai pernyataannya tentang Surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidato di Kepulauan Seribu. Saat itu, Ahok menyatakan bahwa program pemerintah tetap berjalan meskipun ia tidak lagi menjabat, dan mengaitkannya dengan keraguan masyarakat yang dipengaruhi pihak tertentu yang menafsiri ayat tersebut secara tekstual untuk menolaknya sebagai calon non-Muslim. Ia menyebut bahwa memilih adalah hak pribadi dan tak perlu takut karena merupakan panggilan hati masing-masing. Namun, pernyataannya itu menimbulkan protes keras dari sebagian masyarakat yang menganggapnya menuduh penyebar ayat tersebut sebagai pembohong dan rasis, hingga akhirnya memicu polemik luas.

Oleh karena itu, dengan adanya kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menjadikan agama sebagai senjata politik merupakan tindakan yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, hal ini dapat memecah belah masyarakat, dimana penggunaan agama dalam politik sering kali menciptakan polarisasi antara kelompok mayoritas dan minoritas, sehingga memperdalam jurang perbedaan. Kedua, strategi ini berisiko memicu konflik sosial, baik dalam bentuk

gesekan verbal maupun kekerasan fisik, terutama jika narasi yang diangkat memprovokasi sentimen agama tertentu. Ketiga, hal ini dapat merusak integritas demokrasi. Fokus pada identitas agama alih-alih kompetensi dan program kerja calon pemimpin bisa membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas. Selain itu, politisasi agama juga cenderung menanamkan rasa saling curiga antar kelompok dan menurunkan tingkat toleransi di masyarakat. Akibatnya, hubungan antaragama dan antarbudaya yang seharusnya harmonis menjadi renggang.¹⁰

Penelitian mengenai Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka telah banyak dilakukan, namun sebagian besar lebih menitikberatkan pada aspek moral, akhlak, dan keagamaan secara umum. Kajian-kajian tersebut lebih banyak menyoroti peran Hamka dalam membentuk pemahaman keIslaman masyarakat Indonesia tanpa menghubungkannya secara langsung dengan realitas politik kontemporer. Padahal, dalam beberapa penafsirannya, Hamka juga menyinggung persoalan sosial dan kebangsaan yang memiliki

¹⁰ Bikro, R., "Analisis Peran Guru PAI dalam Menanamkan Sikap Toleransi Beragama Siswa di SMK Negeri 1 Tanjung Pura TA 2023–2024," *Journal Millia Islamia*, (2023), p. 234.

relevansi dengan isu politik identitas. Dengan demikian, terdapat celah penelitian untuk mengkaji lebih jauh bagaimana gagasan politik identitas tersirat dalam penafsiran Hamka.

Di sisi lain, studi tentang politik identitas di Indonesia selama ini umumnya menggunakan perspektif ilmu politik, sosiologi, atau kajian konflik sosial. Pendekatan ini memang berhasil menjelaskan dinamika perebutan identitas dan kekuasaan, tetapi cenderung mengabaikan sumber-sumber keagamaan yang justru sering dijadikan legitimasi oleh aktor politik. Padahal, tafsir Al-Qur'an, khususnya karya Buya Hamka, dapat memberikan gambaran bagaimana teks suci dibumikan ke dalam konteks sosial-politik. Minimnya penelitian yang menghubungkan tafsir Al-Qur'an dengan politik identitas menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk menghadirkan perspektif tafsir sebagai landasan analisis dalam kajian politik.

Lebih lanjut, pandangan Hamka yang menempatkan Al-Qur'an sebagai *grundnorm* atau norma dasar dalam kehidupan sosial-politik belum banyak dieksplorasi. Pemikiran ini penting karena dapat menjadi jembatan antara filsafat hukum (seperti yang dikemukakan Hans Kelsen) dengan kajian tafsir keagamaan. Selain itu, dalam

konteks perbedaan penafsiran yang berpotensi memicu konflik identitas, Buya Hamka justru menawarkan metode penafsiran tematik, sosial, dan historis yang relevan untuk memperkuat persatuan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana tafsir Buya Hamka dapat digunakan untuk memahami sekaligus menawarkan solusi atas problem politik identitas di Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan tafsir kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengaitkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial yang berkembang pada masyarakat. Tafsir kontekstual tidak memandang ayat hanya dari sisi tekstual semata, melainkan juga melihat bagaimana pesan ilahi dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang terus berubah. Dalam kerangka ini, penelitian berusaha memahami bagaimana Buya Hamka melalui Tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan kebutuhan bangsa Indonesia yang saat itu sedang membangun identitas politik dan sosial pasca-kemerdekaan. Dengan demikian, pemahaman tafsir tidak terjebak dalam ruang historis masa lalu saja, tetapi juga relevan bagi

pembacaan kontemporer, khususnya dalam konteks politik identitas di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kontekstual sosial-historis. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami tafsir Al-Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan historis yang melatarbelakangi lahirnya penafsiran. Tafsir Al-Azhar lahir dalam suasana pergulatan politik Indonesia, ketika perdebatan ideologi, perpecahan umat, serta pertarungan wacana keagamaan berlangsung cukup kuat. Dengan menggunakan pendekatan sosial-historis, penelitian ini berusaha menangkap bagaimana tafsir Hamka merefleksikan kondisi politik dan sosial zamannya, sehingga dapat dilihat kaitannya dengan problem politik identitas. Melalui cara pandang ini, tafsir dipahami bukan hanya sebagai teks keagamaan, tetapi juga sebagai respons terhadap situasi sosial yang dihadapi masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini juga menerapkan pendekatan pemikiran tokoh. Pendekatan ini memandang penting untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Buya Hamka sebagai seorang ulama, intelektual, dan budayawan. Tidak hanya terbatas pada Tafsir Al-Azhar, pendekatan ini juga menelusuri gagasan Hamka yang

tertuang dalam karya-karya lain serta pengalaman hidupnya yang berinteraksi dengan dinamika sosial-politik bangsa. Dengan memahami latar belakang, pendidikan, pengalaman, dan peran sosial Hamka, penelitian dapat menangkap secara lebih utuh bagaimana pandangannya tentang politik identitas terbentuk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejumlah persoalan yang relevan dengan tema yang diangkat. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini berangkat dari pentingnya memahami hubungan antara pandangan Buya Hamka dan politik identitas, khususnya dalam pemilihan pemimpin. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik politik identitas di Indonesia pada masa reformasi ?
2. Bagaimana kontekstualisasi politik identitas menurut Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar ?

C. Tujuan penelitian

Sebagai lanjutan dari rumusan masalah, tujuan penelitian ini disusun untuk memahami pandangan Buya Hamka terkait politik identitas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik politik identitas di Indonesia pada masa reformasi.
2. Untuk mengkaji kontekstualisasi politik identitas menurut konsep dan pandangan Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan tentang politik identitas berdasarkan pandangan Buya Hamka melalui tafsir kontekstual.
- b. Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pandangan Buya Hamka terkait politik identitas dalam Islam.
- c. Menyediakan referensi tambahan bagi penelitian di bidang tafsir dan ilmu politik Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan panduan bagi umat Islam dalam memahami nilai-nilai kepemimpinan yang sesuai dengan ajaran agama.
- b. Membantu masyarakat untuk menyikapi fenomena politik identitas secara bijaksana.
- c. Menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memilih pemimpin yang berintegritas.

E. Studi Pustaka

Penelitian terdahulu merujuk pada studi atau karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dalam suatu bidang tertentu. Penelitian ini berfungsi sebagai referensi atau dasar untuk penelitian baru yang sedang dilakukan. Dengan menganalisis penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami hal perkembangan dan temuan yang telah ada sebelumnya dalam topik yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi celah penelitian, yaitu area yang belum diteliti atau masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Gamal Akhdan dan Abu Bakar, berjudul "Buya Hamka dan Narasi Politik Identitas dalam Tafsir Al-Azhar", menganalisis pandangan Buya Hamka mengenai

politik identitas melalui tafsirnya terhadap beberapa ayat Al-Qur'an. Hasilnya menunjukkan bahwa Hamka memandang politik identitas sebagai hal penting bagi seorang Muslim untuk berpihak pada Islam, mencerminkan semangat politiknya saat menentang pemerintah terkait PKI. Distingsi dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis. Penelitian Akhdan dan Bakar lebih umum menganalisis pandangan Hamka dan kontribusi tafsirnya pada narasi politik identitas, sementara penelitian ini spesifik pada analisis semiotik simbol dan makna dalam Tafsir Al-Azhar yang memengaruhi politik identitas dalam pemilihan pemimpin.

Selanjutnya, penelitian Fathul Mu'in dkk., "Politik Identitas Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)", membahas politik identitas dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam, dengan fokus pada pentingnya persatuan dan kemasyarakatan dalam politik identitas Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak melarang penggunaan identitas untuk mencapai tujuan selama sesuai dengan standar Al-Qur'an. Distingsi dengan penelitian ini adalah fokus analisis. Penelitian Mu'in dkk. membahas politik identitas dalam Al-Qur'an secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis semiotik Tafsir Al-Azhar secara spesifik,

terutama bagaimana simbol dan maknanya memengaruhi politik identitas dalam pemilihan pemimpin.

Kemudian, penelitian Ariq Hidayat dkk., "Tafsir Dan Kekuasaan: Identitas Khalifah Dalam Framing Demokrasi Religius (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)", mengkaji hubungan antara konsep khilafah dan demokrasi religius dalam Tafsir Al-Azhar. Hasilnya menunjukkan bahwa khalifah bukanlah individu yang dikultuskan, manusia memiliki peran dalam memilih pemimpin, dan kebebasan serta kekuasaan khalifah dapat dibenarkan selama mencegah kemungkaran dan menjalankan kebaikan. Distingsi dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis. Penelitian Hidayat dkk. menitikberatkan pada hubungan konsep khilafah dan demokrasi religius dalam tafsir Hamka. Sebaliknya, penelitian ini menekankan analisis semiotik terhadap Tafsir Al-Azhar untuk memahami bagaimana simbol dan makna di dalamnya memengaruhi politik identitas dalam pemilihan pemimpin.

Penelitian Andaru Arimurti dan Kunta Wibisana yang berjudul "Syukur: Perspektif Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Iklil dan Tafsir Al-Azhar)". Penelitian ini membahas pentingnya rasa syukur berdasarkan Tafsir Al-Iklil dan Tafsir Al-Azhar,

membandingkan perspektif K.H. Misbah Mustafa dan Buya Hamka terkait rasa syukur. Distingui dengan penelitian ini adalah fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Arimurti dan Wibisana menyoroiti makna rasa syukur dalam tafsir. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan analisis semiotik Tafsir Al-Azhar, khususnya bagaimana simbol dan makna yang terkandung di dalamnya memengaruhi politik identitas dalam pemilihan pemimpin.

Selanjutnya, penelitian Kurniawan, D., & Afifi, A. A., "Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Solusi Menyikapi Politik Identitas", membahas polarisasi akibat pemilihan umum dan pentingnya moderasi beragama sebagai solusi untuk mengatasi politik identitas ekstrem. Distingui dengan penelitian ini adalah fokus dan pendekatan. Penelitian Kurniawan dan Afifi berfokus pada penguatan moderasi beragama sebagai solusi politik identitas. Penelitian ini, di sisi lain, lebih fokus pada analisis semiotik Tafsir Al-Azhar, khususnya bagaimana simbol dan makna di dalamnya memengaruhi politik identitas dalam pemilihan pemimpin

Lalu, penelitian Siti Annisa Oceania dkk., "Analisis Penggunaan Politik Identitas Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist", menjelaskan tentang dinamika politik identitas di Indonesia berdasarkan Al-

Qur'an dan Hadits. Penelitian ini menemukan bahwa politik identitas dalam Islam dimaknai sebagai penggunaan identitas Islam untuk keuntungan politik, dan mengidentifikasi tantangan seperti polarisasi dan penyebaran hoaks. Distingsi dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Oceania dkk. lebih berfokus pada analisis penggunaan politik identitas dari perspektif Al-Qur'an dan Hadits secara umum. Penelitian ini lebih menekankan bagaimana nilai-nilai Islam dapat berperan dalam mengatasi tantangan politik identitas, serta mengeksplorasi dampak sosial dan budaya politik identitas dalam masyarakat Indonesia saat ini melalui analisis semiotik Tafsir Al-Azhar.

Berikutnya, penelitian Halimatussa'diyah dkk., "Tafsir Politik: Studi terhadap Pemikiran Politik Hamka dan Pengaruhnya dalam Tafsir Al-Azhar", menjelaskan tentang pemikiran politik Hamka dan pengaruhnya dalam Tafsir Al-Azhar. Hasilnya menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan musyawarah dalam pemerintahan, pemimpin harus beriman, dan tidak ada pemisahan agama dan negara dalam kepemimpinan. Distingsi dengan penelitian ini yang berjudul "Kontekstualisasi Penafsiran Politik Identitas di Era Reformasi (Studi Terhadap Penafsiran Buya Hamka)" terletak pada

pendekatan dan fokus analisis. Penelitian Halimatussa'diyah dkk. berfokus pada pemikiran politik Hamka dan pengaruhnya dalam Tafsir Al-Azhar secara umum. Penelitian ini lebih menekankan analisis semiotik Tafsir Al-Azhar, khususnya terkait politik identitas yang muncul selama pemilihan pemimpin, dan bagaimana simbol serta maknanya memengaruhi persepsi masyarakat.

Penelitian Nafilah Sulfa, "Ulama dalam Penguatan Politik Identitas Perspektif Al-Qur'an", membahas peran ulama dalam politik identitas di Indonesia, menyoroti distorsi yang mungkin terjadi pada fatwa ulama dan dampaknya. Hasilnya menunjukkan bahwa fatwa ulama memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk narasi sosial dan menekankan peran positif ulama dalam politik. Distingsi dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis dan pendekatan. Penelitian Sulfa berfokus pada peran ulama dan dampak fatwa mereka dalam politik identitas. Sebaliknya, penelitian ini lebih menekankan analisis semiotik Tafsir Al-Azhar, khususnya bagaimana simbol dan makna di dalamnya memengaruhi politik identitas dalam pemilihan pemimpin.

Terakhir, penelitian Rani Martia Sari dkk., "Kontekstualisasi Ayat-Ayat tentang Kepemimpinan dalam Al-Qur'an (Studi

Fenomena Politik Identitas Indonesia)", membahas pentingnya pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an tentang kepemimpinan dalam konteks politik identitas di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa Al-Qur'an memberikan prinsip universal untuk masyarakat adil sejahtera meskipun tidak mengatur sistem formal kepemimpinan, dan menyoroti bagaimana politik identitas memengaruhi interpretasi nilai-nilai kepemimpinan. Distingsi dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis dan pendekatan. Penelitian Sari dkk. berfokus pada kepemimpinan dan penerapan ayat-ayat Al-Qur'an dalam fenomena politik identitas. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan analisis semiotik Tafsir Al-Azhar, khususnya bagaimana simbol dan makna di dalamnya memengaruhi politik identitas dalam pemilihan pemimpin.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu struktur konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena yang sedang diteliti.¹¹ Tujuan utama dari kerangka teori adalah untuk memberikan panduan bagi peneliti

¹¹ Deni, H. A., Mm, C. Q. M., Fatkhur Rohman Albanjari, M. E., Nurofik, A., Anwar, H. M., Bakri, A. A., dan Anshori, M. I., *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2024), p. 8.

dalam merancang penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil.¹² Adapun kerangka teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Tafsir Kontekstual

Dalam kajian keilmuan Islam, tafsir telah menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam memahami wahyu Tuhan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Secara tradisional, tafsir cenderung dilakukan dengan pendekatan tekstual, yaitu memahami ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan makna harfiah dan konteks zaman saat wahyu itu diturunkan.¹³ Namun, dunia terus berkembang, begitu pula dengan tantangan dan persoalan yang dihadapi umat manusia. Berbagai perubahan sosial, politik, dan budaya yang terus terjadi menuntut adanya pemahaman yang lebih dinamis terhadap wahyu Tuhan.¹⁴

Dengan pendekatan kontekstual, tafsir tidak hanya terbatas pada pemahaman ayat secara tekstual, tetapi juga melibatkan proses ijtihad yang mempertimbangkan keadaan zaman, tantangan sosial, serta kebutuhan umat. Hal ini memungkinkan

¹² Deni dkk., *Metodologi Penelitian Bisnis*, p. 9.

¹³ M. Solahudin, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1, 2 (2016), p. 115–130.

¹⁴ Solahudin, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an," p. 1 20.

agama dan ajaran Islam untuk tetap relevan dan memberikan solusi bagi masalah-masalah kontemporer yang dihadapi masyarakat.¹⁵ Proses transisi dari tafsir tekstual yang lebih kaku ke tafsir kontekstual ini menunjukkan perubahan pemikiran Islam yang mengedepankan penafsiran yang lebih aplikatif.¹⁶ Sebagai sebuah metode pemahaman Al-Qur'an, tafsir kontekstual membawa tantangan bagi para ulama dan intelektual Muslim untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan lebih bijaksana, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama, tetapi tetap menyentuh realitas kehidupan sehari-hari umat manusia.

a. Pengertian Tafsir Kontekstual

Tafsir kontekstual adalah pendekatan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang memprioritaskan pemaknaan terhadap teks secara mendalam berdasarkan situasi, kondisi, dan latar belakang di mana teks tersebut diturunkan.¹⁷ Secara konseptual, pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada arti literal dari kata atau kalimat dalam ayat, tetapi lebih jauh

¹⁵ M. A. Rosa, "Prinsip Dasar dan Ragam Penafsiran Kontekstual dalam Kajian Teks Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw," *Holistic al-Hadis*, 1, 2 (2015), p. 171–224.

¹⁶ Rosa, "Prinsip Dasar dan Ragam Penafsiran Kontekstual dalam Kajian Teks Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw," p. 175.

¹⁷ Rosa, "Prinsip Dasar dan Ragam Penafsiran Kontekstual dalam Kajian Teks Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw," p. 180

berupaya mengungkap nilai-nilai, tujuan, dan pesan moral yang tersimpan di balik susunan teks wahyu. Tujuan utamanya adalah agar makna Al-Qur'an tetap hidup, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman.¹⁸

Tafsir kontekstual muncul sebagai respons terhadap perkembangan zaman yang mengharuskan pemahaman teks agama bersifat dinamis.¹⁹ Pemahaman literal atau tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dianggap belum mampu menjawab berbagai permasalahan kontemporer yang kompleks.²⁰ Hal ini karena pendekatan tekstual cenderung menafsirkan ayat secara kaku dan terbatas pada makna gramatikal. Sementara itu, tafsir kontekstual memandang bahwa ayat-ayat Al-Qur'an bersifat dinamis, terbuka, dan harus dipahami melalui pendekatan yang mempertimbangkan unsur sejarah, budaya, sosiologi, dan bahkan psikologi

¹⁸ Hidayat, H., Wahid, N. R., dan Putri, N. K., "Metode Tafsir Al-Qur'an," *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, I, 4, (2024), p. 369.

¹⁹ Muallifah, M., Samosir, K., dan Said, H. A., "Metodologi Tafsir Modern-Kontemporer di Indonesia," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, V, 2, (2022), pp. 302–314..

²⁰ Bahana, M. H. A., "Relevansi Tafsir Kontekstual dalam Menjawab Masalah Sosial-Kemasyarakatan di Abad 21," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, I, 4, (2024), pp. 135–142.

masyarakat pada masa turunnya ayat, serta kebutuhan umat Islam masa kini.²¹

Menurut Abdullah Saeed, tafsir kontekstual adalah metode pembacaan Al-Qur'an yang memperhatikan dua konteks sekaligus. Pertama, konteks awal (*original context*) yaitu kondisi historis, sosial, dan budaya ketika ayat diturunkan; kedua, konteks kontemporer (*contemporary context*) yaitu kondisi umat Islam saat ini yang menjadi pembaca ayat. Dengan memahami kedua konteks ini, seorang mufasir diharapkan dapat menjembatani pesan ilahi dengan realitas zaman, sehingga interpretasi terhadap ayat menjadi lebih aplikatif dan solutif bagi persoalan umat.²²

Salah satu contoh penerapan tafsir kontekstual adalah penafsiran terhadap ayat-ayat tentang perempuan, seperti ayat warisan, kesaksian perempuan, atau kepemimpinan perempuan.²³ Dalam pendekatan tekstual, ayat-ayat tersebut

²¹ Chaer, H., dan Rasyad, A., "Hermeneutika Al-Qur'an Suroh Al-Isro' Ayat 1 Sebuah Tinjauan Kosmologi," *PALAPA*, VII, 1, (2019), p. 69.

²² Budiman, S., Wahyudin, W., Muhtarom, A., Budiarjo, B., dan Sufyan, A., "Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed dalam Al-Qur'an Abad 21," *Journal of Education Research*, V, 1, (2024), pp. 821–830.

²³ Ridho, A. R., "Reformulasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer," *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, II, 2, (2020), p. 218.

sering dipahami secara literal dan dianggap membatasi peran serta hak perempuan dalam kehidupan publik. Namun, pendekatan kontekstual mencoba mengurai makna historis dari ayat tersebut, memahami konteks sosial patriarkal saat itu, lalu menyandingkannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Hasilnya adalah pemaknaan yang lebih adil dan proporsional terhadap peran perempuan dalam masyarakat modern.

Tafsir kontekstual juga berpijak pada prinsip bahwa wahyu ilahi memiliki dua dimensi utama yaitu dimensi sakral (*divine message*) yang bersifat universal dan tidak berubah, serta dimensi historis (*human understanding*) yang berkaitan dengan budaya, kondisi sosial, dan struktur masyarakat pada masa Nabi.²⁴ Pemahaman literal cenderung melekat pada dimensi historis tanpa menyaring nilai-nilai universal di baliknya. Di sinilah tafsir kontekstual berperan, yakni menggali nilai-nilai universal yang tersembunyi dalam kerangka historis teks.

²⁴ Aderus, A., dan Amri, M., "Tektualisasi dan Kontektualisasi Ajaran Islam dalam Al-Qur'an/Hadis," *Journal Education and Government Wiyata*, II, 3, (2024), p. 365.

Pendekatan ini mengandaikan bahwa makna Al-Qur'an tidak bersifat tunggal. Makna Al-Qur'an dapat berkembang sesuai dengan perkembangan pengetahuan, pengalaman sosial, dan kedalaman spiritual pembacanya.²⁵ Oleh karena itu, pendekatan kontekstual membuka ruang ijtihad yang luas dalam menafsirkan ayat, tanpa melepaskan diri dari akar-akar nilai Islam yang otentik.

Kendati demikian, pendekatan ini juga tidak lepas dari kritik. Sebagian kalangan konservatif menilai bahwa tafsir kontekstual terlalu liberal dan berpotensi menyimpang dari makna asli wahyu. Mereka khawatir bahwa pendekatan ini dapat dijadikan pembenaran untuk menyesuaikan agama dengan kepentingan zaman. Kritik semacam ini dapat dipahami, namun pada saat yang sama juga menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara pemikiran klasik dan kontemporer.

Studi mengenai tafsir kontekstual tidak dapat dipisahkan dari konsep "konteks" yang merujuk pada situasi atau kondisi

²⁵ Doriza, N. R., Yusro, N., dan Ristianti, D. H., "Implementasi Program Kokurikuler Tahsin dalam Meningkatkan Minat dan Kemampuan Membaca Al-Qur'an di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rejang Lebong," *Jurnal Literasiologi*, X, 1, (2023), p. 5.

yang melingkupi suatu peristiwa. Pemahaman kontekstual terhadap Al-Quran merupakan upaya untuk menafsirkan makna ayat-ayat suci dengan mempertimbangkan latar belakang historis, sosial, dan kultural yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Dalam hal ini, aspek yang paling krusial dalam kajian tafsir kontekstual adalah konteks sosio-historis, di mana asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) memainkan peran sentral. Asbabun nuzul tidak hanya menjadi alat untuk memahami pesan Al-Quran secara literal, tetapi juga sebagai jembatan untuk menghubungkan pesan-pesan tersebut dengan konteks kekinian.

Abdullah Saeed, sebagai salah satu tokoh yang melanjutkan dan mengembangkan teori *double movement* Fazlur Rahman, menekankan pentingnya pendekatan tafsir yang tidak terbatas pada pemahaman tekstual semata.²⁶ Ia mengusulkan sebuah metodologi penafsiran yang bertujuan untuk mendialogkan ajaran-ajaran Islam dengan tantangan kontemporer, termasuk perubahan sosial, budaya, intelektual, ekonomi, dan politik. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk

²⁶ Asroni, A., "Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an: Telaah Atas Pemikiran Abdullah Saeed," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, IV, 1, (2021), p. 109.

mengurangi signifikansi atau otoritas Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam, melainkan untuk memperluas cakupan pemahaman dan aplikasinya dalam konteks yang terus berkembang. Dengan demikian, tafsir kontekstual menjadi alat yang relevan untuk merespons dinamika masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.

Menurut Saeed, kelompok tekstualis cenderung memandang Al-Qur'an sebagai pedoman praktis yang dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks sosial dan historis, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip fundamental Islam.²⁷ Tafsir kontekstual tidak menafikan otoritas teks Al-Qur'an sebagai sumber kebenaran.²⁸ Namun, otoritas tersebut tidak terletak pada teks secara harfiah, melainkan pada substansi pesan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang terus-menerus untuk membaca dan memahami pesan Tuhan dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda. Dengan pendekatan ini, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai kitab suci yang relevan pada masa turunnya,

²⁷ Nurhasanah, N., Hayatuddin, A., dan Hidayat, Y. R., *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Amzah, 2021), p. 99.

²⁸ Hukmiah, H., dan Saad, M., "Al-Qur'an antara Teks dan Konteks," *Dirasat Islamiyah*, I, 1, (2020), p. 8.

tetapi juga sebagai sumber solusi bagi masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat manusia.

Abdullah Saeed memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan metodologi tafsir kontekstual. Ia mengusulkan beberapa langkah penting yang harus dilakukan dalam proses penafsiran kontekstual. Pertama, penafsir harus “bertemu dengan dunia teks”, yaitu memahami teks Al-Qur’an secara mendalam melalui analisis linguistik, sastra, dan relasi antar-ayat. Kedua, penafsir perlu melakukan analisis kritis terhadap teks, termasuk mengkaji aspek-aspek historis dan kultural yang melatarbelakangi turunnya ayat. Ketiga, penafsir harus mengidentifikasi makna historis ayat ketika pertama kali diturunkan kepada penerima wahyu, yaitu Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Arab pada masa itu. Keempat, penafsir harus menentukan makna kontekstual ayat dan mengaplikasikan pesan-pesan tersebut dalam konteks yang berbeda, termasuk konteks kekinian.²⁹

²⁹ Umala, F. N., dan Mumtaza, A., “Tafsīr Kontekstual QS. Al-Anfal [8]: 28 dan Kaitannya dengan Fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed),” *Mafatih*, II, 1, (2022), p. 35.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa tafsir kontekstual bukanlah proses yang sederhana, melainkan memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai bidang ilmu, seperti sejarah, sosiologi, antropologi, dan linguistik. Dengan demikian, tafsir kontekstual tidak hanya bertujuan untuk memahami Al-Qur'an secara akademis, tetapi juga untuk menjadikannya sebagai sumber inspirasi dan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi umat manusia di era modern.

Penting untuk dicatat bahwa tafsir kontekstual tidak bermaksud menggantikan atau mengabaikan pendekatan tekstual. Sebaliknya, kedua pendekatan ini saling melengkapi. Pendekatan tekstual tetap diperlukan untuk menjaga keotentikan dan integritas teks Al-Qur'an, sementara pendekatan kontekstual berperan dalam menghubungkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial dan kultural yang terus berubah. Dengan kata lain, tafsir kontekstual bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teks suci dan konteks kekinian, sehingga Al-Qur'an dapat terus menjadi

sumber petunjuk dan inspirasi bagi umat manusia di segala zaman.

Melalui pendekatan ini, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai kitab suci yang terbatas pada konteks historis tertentu, tetapi juga sebagai sumber kebenaran yang universal dan abadi. Pesan-pesan Al-Qur'an dapat terus diaktualisasikan dalam berbagai konteks sosial, kultural, dan historis, sehingga tetap relevan dan bermakna bagi umat manusia di segala zaman. Dengan demikian, tafsir kontekstual tidak hanya menjadi alat untuk memahami Al-Qur'an, tetapi juga menjadi sarana untuk menghidupkan dan mengaktualisasikan pesan-pesan suci tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pengertian Tafsir Kontekstual

Dalam tafsir kontekstual, terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi kunci utama dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an agar tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan umat Islam masa kini. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman metodologis, tetapi juga mencerminkan semangat ijtihad dan pembaruan dalam menggali nilai-nilai universal yang terkandung dalam wahyu. Pendekatan ini berangkat dari

keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah kitab petunjuk yang bersifat transenden, namun maknanya dapat dijangkau manusia melalui proses interpretasi yang dinamis dan bertanggung jawab.

1) Pemahaman atas Konteks Historis

Salah satu prinsip utama dalam tafsir kontekstual adalah pentingnya memahami asbāb al-nuzūl (sebab-sebab turunnya ayat). Konteks historis mencakup latar belakang sosial, budaya, politik, ekonomi, bahkan psikologis masyarakat Arab saat wahyu diturunkan. Dengan mengetahui latar ini, seorang mufasir dapat membedakan mana ajaran yang bersifat universal dan mana yang bersifat partikular, yakni berkaitan dengan kondisi sementara. Hal ini sangat penting untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan ayat pada konteks modern yang sangat berbeda dari kondisi abad ke-7 Masehi.

2) Pemahaman atas Konteks Kontemporer

Selain memahami konteks masa lalu, tafsir kontekstual juga mengharuskan pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial umat Islam saat ini. Ini termasuk tantangan

globalisasi, demokrasi, pluralisme agama, kesetaraan gender, hak asasi manusia, hingga isu-isu lingkungan. Konteks kontemporer digunakan sebagai kaca pembesar untuk menafsirkan ulang ayat-ayat dengan cara yang solutif dan responsif. Maka, seorang mufasir perlu memiliki wawasan luas tentang dinamika sosial dan mampu menilai relevansi makna ayat dalam situasi kekinian.

3) Penekanan pada Maqāṣid al-Syarī'ah

Prinsip penting lainnya adalah pengutamaan pada maqāṣid al-syarī'ah atau tujuan-tujuansyariat, yaitu keadilan, rahmat, kemaslahatan, kebebasan, dan kesetaraan. Dalam tafsir kontekstual, teks-teks Al-Qur'an tidak dipahami secara harfiah semata, melainkan harus dirujuk pada nilai-nilai luhur yang menjadi ruh ajaran Islam. Dengan orientasi pada maqāṣid, maka sebuah penafsiran akan lebih menekankan pada substansi ketimbang bentuk, pada nilai ketimbang simbol.

4) Kritis terhadap Pemahaman Teks secara Literal

Tafsir kontekstual tidak menolak pemahaman literal, namun bersikap kritis terhadap upaya menggeneralisasi

seluruh ayat dalam makna harfiahnya. Misalnya, perintah untuk memotong tangan pencuri atau ayat tentang jihad tidak bisa serta-merta dipahami dan diterapkan dalam makna literal tanpa mempertimbangkan dimensi etik dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, prinsip ini menegaskan bahwa pemahaman teks harus disertai nalar kritis dan sensitivitas kontekstual.

5) Keterbukaan terhadap Ilmu Pengetahuan

Tafsir kontekstual memosisikan ilmu pengetahuan modern sebagai alat bantu penting dalam memahami Al-Qur'an. Pendekatan-pendekatan dari ilmu sosial, humaniora, linguistik, hingga filsafat digunakan untuk membaca ulang teks wahyu secara lebih tajam. Metodologi hermeneutika, sosiologi pengetahuan, bahkan studi gender telah dipakai dalam berbagai proyek tafsir kontemporer. Dengan demikian, tafsir tidak terjebak pada repetisi pendapat klasik, tetapi membuka ruang pembaruan yang inklusif dan ilmiah.

2. Teori Politik Identitas

Menurut L.A. Kauffman, politik identitas adalah sebuah bentuk pengorganisasian politik yang muncul dari kesadaran akan pengalaman penindasan yang khas berdasarkan identitas sosial tertentu seperti ras, gender, orientasi seksual, atau etnisitas. Ia menguraikan bahwa politik identitas awalnya berkembang dari gerakan-gerakan emansipatoris, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu salah satu contohnya adalah SNCC (Student Nonviolent Coordinating Committee) dalam gerakan hak-hak sipil Amerika.³⁰

Politik identitas, dalam konteks kajian teks agama, seringkali dipahami sebagai pemanfaatan atau penekanan atribut-atribut keagamaan seperti afiliasi mazhab, etnisitas berbasis agama, atau interpretasi keagamaan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Fenomena ini bukanlah hal baru. Ia telah menjadi objek kajian yang kaya dalam literatur keilmuan Indonesia. Identitas merupakan sumber makna dan pengalaman bagi individu maupun kolektivitas. Dalam era modern, identitas-identitas partikular seringkali menguat

³⁰ Umala dan Mumtaza, "Tafsīr Kontekstual QS. Al-Anfal [8]: 28 dan Kaitannya dengan Fenomena Childfree," p. 25.

sebagai respons terhadap berbagai dinamika sosial dan politik. Ketika identitas ini bersentuhan dengan ranah agama, ia menjadi sangat kuat karena agama seringkali memberikan legitimasi moral dan transendental pada klaim-klaim politik.

Kajian teks agama menjadi salah satu hal penting dalam memahami politik identitas karena teks-teks suci seringkali menjadi sumber legitimasi utama bagi aktor-aktor yang memainkan isu identitas. Teks agama, seperti Al-Qur'an, Hadis, atau kitab-kitab tafsir, tidak bersifat tunggal dalam interpretasinya. Sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam berbagai karyanya seperti Tafsir Al-Mishbah (2000), penafsiran Al-Qur'an adalah proses dinamis yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan sejarah penafsir. Oleh karena itu, ayat-ayat atau narasi keagamaan dapat diinterpretasikan secara berbeda untuk mendukung agenda politik yang beragam. Misalnya, konsep kepemimpinan dalam Islam seringkali menjadi fokus dalam diskursus politik identitas. Ayat Al-Qur'an yang relevan adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." QS. An-Nisa' [4]: 59

Ayat ini, khususnya frasa "ulil amri minkum" (pemegang kekuasaan di antara kamu), seringkali menjadi dasar perdebatan dan penafsiran dalam konteks politik identitas mengenai kriteria pemimpin dan siapa yang berhak memimpin. Penafsiran yang berbeda terhadap ayat ini dapat digunakan untuk mendukung narasi politik tertentu, seperti menekankan pentingnya pemimpin yang beragama Islam atau bahkan dari kelompok identitas tertentu.

Dalam politik identitas, teks agama seringkali digunakan sebagai "modal simbolik" yang efektif dalam mobilisasi massa. Seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Saeed dalam *The Qur'an: An Introduction* (2008) yang meskipun bukan dari

Indonesia tapi karyanya banyak dirujuk di Indonesia, simbol-simbol agama dapat dikonversi menjadi bentuk kekuasaan. Ketika seorang politisi atau kelompok menggunakan dalil-dalil agama atau menafsirkan ayat-ayat suci untuk mendukung argumen mereka, mereka bukan hanya menyampaikan pesan verbal, tetapi juga mengaktifkan jaringan makna dan nilai-nilai yang mendalam dalam kesadaran kolektif umat beragama. Hal ini dapat menciptakan polarisasi, di mana identitas keagamaan menjadi garis demarkasi yang kuat dalam kontestasi politik.

3. Teori Hermeneutika Al-Qur'an

Hermeneutika Al-Qur'an merupakan salah satu pendekatan yang relatif baru dalam kajian tafsir, meskipun akarnya dapat ditemukan dalam tradisi penafsiran klasik.³¹ Hermeneutika berangkat dari pemikiran filsafat Barat yang pada mulanya digunakan untuk menafsirkan teks-teks Yunani kuno dan kitab suci. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, hermeneutika kemudian dipandang sebagai ilmu, seni, sekaligus metode untuk memahami makna teks.

³¹ Muslimin, M., Abubakar, A., & Ilyas, H. (2025). Kontribusi Asbabun Nuzul Terhadap Hermeneutika Al-Qur'an. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2128-2136.

Dalam konteks kajian Islam, hermeneutika dimanfaatkan untuk menginterpretasi Al-Qur'an secara lebih kontekstual dengan memperhatikan latar sejarah turunnya ayat, bahasa yang digunakan, serta kondisi sosial budaya masyarakat saat ini. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan tafsir klasik, melainkan sebagai upaya melengkapi metode tafsir agar Al-Qur'an tetap relevan dengan dinamika kehidupan modern.

Pada dasarnya, hermeneutika Al-Qur'an lahir dari kesadaran bahwa teks wahyu memiliki dua dimensi penting. Pertama adalah dimensi historis, yakni bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam ruang dan waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi masyarakat Arab pada abad ketujuh. Kedua adalah dimensi transenden, yaitu bahwa Al-Qur'an mengandung pesan universal yang berlaku sepanjang masa. Keseimbangan antara keduanya menjadi fokus utama hermeneutika. Tanpa memperhatikan dimensi historis, seorang penafsir bisa terjebak pada makna tekstual yang kaku. Namun jika hanya menekankan dimensi historis, maka kesakralan dan nilai transenden Al-Qur'an bisa

terabaikan. Oleh sebab itu, hermeneutika hadir untuk menjaga agar tafsir tetap bersifat religius sekaligus relevan dengan perkembangan zaman.

Prinsip utama hermeneutika Al-Qur'an dapat dijelaskan melalui tiga komponen penting, yaitu dunia teks, dunia pengarang, dan dunia pembaca. Dunia teks merujuk pada bahasa, struktur kalimat, simbol, serta gaya retorika yang digunakan dalam Al-Qur'an. Bahasa Arab yang dipakai dalam Al-Qur'an sarat dengan makna kiasan, majas, dan struktur gramatikal tertentu yang memerlukan pemahaman mendalam. Dunia pengarang dalam konteks Islam bukan sekadar penulis manusia, melainkan Allah sebagai sumber wahyu. Namun karena wahyu diturunkan melalui Nabi Muhammad, maka dimensi sejarah dan kondisi sosio-kultural pada masa kenabian ikut berperan dalam membentuk teks. Adapun dunia pembaca menunjuk pada siapa saja yang membaca, menafsirkan, dan menghayati Al-Qur'an dalam konteks sosial budaya yang berbeda

sepanjang sejarah. Ketiga dunia ini harus dihubungkan agar pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak bersifat parsial.³²

Hermeneutika juga menekankan pentingnya dialog antara teks dan realitas. Teks Al-Qur'an yang turun lebih dari 14 abad lalu jelas berinteraksi dengan masyarakat Arab yang memiliki struktur sosial, politik, dan budaya tertentu. Namun teks itu tidak berhenti pada masyarakat awal Islam saja. Ia terus dibaca dan dihidupkan ulang oleh umat Islam dalam berbagai situasi zaman yang berbeda. Proses dialog ini menuntut penafsir untuk memahami konteks turunnya ayat, kemudian merelevansikannya dengan tantangan kontemporer. Misalnya, ayat tentang perdagangan pada masa Nabi dipahami dalam konteks ekonomi pasar tradisional, sementara di era modern bisa diterapkan dalam sistem perbankan, perdagangan internasional, atau digitalisasi ekonomi. Dengan demikian, Al-Qur'an tetap aktual tanpa kehilangan otoritasnya sebagai wahyu.

³² Shohib, M. (2025). Pendekatan Hermeneutika Kontemporer dalam Penafsiran Al-Qur'an: Menjembatani Eksposisi Tradisional dan Konteks Modern. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 2(7), 711-718.

Tokoh-tokoh pembaharu dalam studi Islam banyak yang mengembangkan teori hermeneutika untuk menafsirkan Al-Qur'an. Fazlur Rahman misalnya, melalui metode double movement, menekankan pentingnya bergerak dari konteks historis menuju prinsip moral universal, lalu kembali mengaplikasikannya pada konteks modern. Hasan Hanafi menekankan aspek ideologi dengan menafsirkan Al-Qur'an sebagai sarana pembebasan umat dari penindasan sosial dan politik. Nasr Hamid Abu Zayd menganggap Al-Qur'an sebagai teks yang hidup dan selalu terbuka untuk penafsiran ulang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pemikiran mereka menunjukkan bahwa hermeneutika bukan hanya metode akademik, melainkan juga jalan untuk menghadirkan pesan Al-Qur'an secara nyata dalam kehidupan umat Islam.

Dalam praktiknya, hermeneutika Al-Qur'an tidak lepas dari kritik. Sebagian ulama menganggap pendekatan ini terlalu banyak dipengaruhi oleh filsafat Barat sehingga dikhawatirkan mereduksi kesucian wahyu. Kritik lainnya

menilai bahwa hermeneutika membuka peluang relativisme, karena penafsiran bisa berubah-ubah sesuai konteks pembaca. Namun pendukung hermeneutika menegaskan bahwa metode ini justru sejalan dengan tradisi tafsir klasik. Para mufasir terdahulu pun menggunakan asbabun nuzul, riwayat hadis, serta kondisi sosial politik dalam memahami ayat. Bedanya, hermeneutika memberi kerangka teoritis yang lebih sistematis sehingga bisa menjawab tantangan akademis di era modern.

Keunggulan hermeneutika terletak pada kemampuannya menjembatani teks dengan realitas. Melalui pendekatan ini, umat Islam diajak untuk melihat bahwa Al-Qur'an bukan sekadar teks statis yang hanya berlaku pada masa lalu. Al-Qur'an selalu hidup, berbicara, dan memberi petunjuk di setiap zaman. Misalnya, ayat-ayat tentang keadilan sosial dapat diaktualisasikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemberantasan korupsi, dan pemenuhan hak asasi manusia. Ayat-ayat tentang lingkungan hidup bisa ditafsirkan ulang untuk mendukung gerakan pelestarian alam. Hal ini menunjukkan bahwa

hermeneutika membuka ruang kreatif bagi penafsiran, selama tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an.

Selain itu, hermeneutika membantu penafsir menyadari keterbatasan dirinya. Setiap pembaca membawa latar belakang sosial, budaya, dan intelektual tertentu yang memengaruhi cara pandangnya terhadap teks. Dengan kesadaran ini, penafsir bisa lebih rendah hati dan terbuka terhadap perbedaan tafsir. Hermeneutika mengajarkan bahwa makna Al-Qur'an tidak pernah tunggal, melainkan kaya dan berlapis. Justru dari keragaman penafsiran itu, Al-Qur'an menjadi sumber inspirasi yang tak pernah habis digali.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hermeneutika Al-Qur'an adalah pendekatan yang menekankan keterpaduan antara konteks historis, struktur teks, dan realitas pembaca. Ia berusaha menghadirkan pesan wahyu secara universal dan relevan dengan tantangan zaman. Meskipun tidak lepas dari kritik, hermeneutika tetap memberikan kontribusi besar dalam memperkaya khazanah tafsir. Dengan metode ini, umat Islam diharapkan mampu

menangkap nilai-nilai esensial Al-Qur'an dan menerapkannya dalam kehidupan nyata, sehingga Al-Qur'an benar-benar menjadi petunjuk hidup yang membimbing umat manusia menuju kebaikan.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka (library research) yang berfokus pada pengkajian literatur relevan untuk menganalisis pemikiran Buya Hamka mengenai politik, khususnya dalam karyanya *Tafsir al-Azhar*. Metode ini didukung oleh pendekatan kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap teks dan konteks, bukan pada data numerik. Melalui analisis tematik terhadap karya-karya Hamka, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama terkait politik dan menggali pesan-pesan yang disampaikan, sehingga diharapkan dapat memahami relevansi pemikiran Hamka dalam dinamika politik Indonesia saat ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai

literatur yang relevan. Sumber data primer berupa karya Buya Hamka, terutama *Tafsir al-Azhar*, sementara data sekunder mencakup buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas pemikiran politik Hamka. Pengumpulan data dilakukan melalui perpustakaan fisik dan digital dengan mengutamakan literatur kredibel dan relevan. Prosesnya mencakup pembacaan mendalam terhadap bagian yang membahas kepemimpinan, keadilan, dan peran umat Islam, lalu mencatat serta mengelompokkan ide-ide penting. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk menggali pandangan politik Hamka dan relevansinya dalam konteks Indonesia.

3. Analisis Data

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis konten untuk menelaah gaya, metode, dan orientasi interpretatif (*al-lawn wa al-ittijâh*) guna memahami substansi tafsir yang dikaji. Selain itu, digunakan pula teknik perbandingan (*muqâran*) untuk membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kemiripan redaksi namun berbeda konteks, serta mencocokkannya dengan hadis Nabi Muhammad. Analisis ini mempertimbangkan aspek konteks sosial-politik, pilihan kata,

dan pandangan ulama guna mengungkap variasi makna antar tafsir. Teknik ini juga membantu mengevaluasi argumentasi para mufasir, memilih tafsir yang logis, dan menolak yang kurang dapat diterima, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan terhadap isu yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan panduan yang terstruktur mengenai alur penelitian, dimulai dari pendahuluan hingga penutup, sehingga pembaca dapat memahami setiap tahapan penelitian secara mendalam dan menyeluruh. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode yang digunakan. Di bagian ini juga disajikan kerangka teori dan sistematika penulisan sebagai panduan struktur isi skripsi.

Bab II Bab ini membahas biografi singkat Buya Hamka serta karakteristik metode dan gaya penafsiran Al-Qur'an yang beliau

gunakan, termasuk pendekatan kontekstual dan nilai-nilai yang mendasarinya.

Bab III Bab ini menjelaskan praktik politik identitas yang terjadi pasca reformasi.

Bab IV Bab ini memaparkan prinsip-prinsip atau nilai dasar politik identitas menurut pemikiran Buya Hamka, seperti keadilan, persatuan, dan moralitas, serta implikasinya dalam konteks kebangsaan.

Bab V Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, menjawab rumusan masalah, serta memberikan saran atau rekomendasi jika diperlukan.